

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara-negara Demokrasi ‘Barat’ adalah tujuan yang paling dicari dalam migrasi internasional, namun mereka tidak selalu bersikap terbuka terhadap hal ini¹. Negara-negara tersebut menerapkan kebijakan untuk mengatur migrasi internasional terkait dengan pencari suaka dan imigran ilegal². Istilah seperti imigran ilegal, imigran gelap, atau migran tanpa dokumen, sering digunakan dalam diskusi untuk merujuk kepada pencari suaka³. Di antara negara-negara penerima tersebut, Australia dianggap sebagai yang paling ketat dalam menerapkan kebijakan pengendalian imigrasi⁴.

Pada tahun 2001, mantan Perdana Menteri Australia, John Howard, yang berasal dari Koalisi Partai Liberal-Nasional, mengimplementasikan kebijakan perlindungan perbatasan yang dikenal sebagai Pacific Solution, yang mana dalam kebijakan ini, Angkatan Laut Australia mencegat kapal yang membawa para pengungsi dan memaksa mereka kembali ke negara asal mereka⁵. Kebijakan ini dipersepsikan sebagai respons terhadap migrasi ilegal dengan alasan keamanan

¹ Violet Cheung-Blunden, “Sources of Anti-Immigrant Sentiments in Western Democracies: A Contextual Approach.”. 2022 *Current Opinion in Psychology*, volume 47

² W. Cornelius, P. Martin, and J. Hollifield (eds.). “Controlling Immigration: A Global Perspective” (Stanford: Stanford University Press, 1995),

³ Peter Aspinall and Charles Watters. ”Refugees and Asylum Seekers : A Review from An Equality and Human Rights Perspective”. 2010. *Equality and Human Rights Commission Research report 52*. <https://kar.kent.ac.uk/24337/>

⁴ Linda Briskman. “Australia’s Asylum Politics: Localised, Globalised”. 2017. <http://www.e-ir.info/2017/07/26/australias-asylum-politics-localised-globalised/> >

⁵Natalia Yeti Puspita, Annisa Irina Nur Halima. “PACIFIC SOLUTION POLICY: MENGGUGAT TANGGUNG JAWAB AUSTRALIA DALAM PENANGANAN PENGUNGGSI”. 2020. <https://ejournal.atmajaya.ac.id/index.php/paradigma/article/download/1648/864/4712>

nasional. Peter Reith, yang merupakan mantan Menteri Pertahanan Australia, menyatakan setelah peristiwa 9/11 di AS bahwa Australia harus mengatur arus pencari suaka untuk menghindari menjadi jalur masuk bagi teroris dan mengubah negara menjadi markas mereka⁶. Pada waktu itu, meskipun tidak semuanya, sebagian besar pencari suaka datang dari Timur Tengah, Asia Barat, dan Afrika Utara, yang negara-negara tersebut didominasi oleh populasi Muslim⁷.

Di samping itu, pencari suaka dipandang sebagai ancaman bagi identitas nasional, karena ada ambivalensi terhadap budaya asing yang muncul dari sekelompok orang yang tidak dikenal⁸. Bisa dilihat dari *statement* Mantan PM, Tony Abbott dari Koalisi Liberal-Nasional, dalam wawancara kanal berita *SkyNews* “*All cultures are not equal, and frankly, culture that believes in decency and tolerance is much to be preferred than one that thinks that you can kill in the name of God, and you’ve got to be prepared to say that*”⁹. Selama periode tersebut, ada pemisahan fenomena antara “pencari suaka dan pengungsi”, “Muslim”, serta “terorisme” dalam liputan media dan wacana dari elit politik, yang dianggap sebagai satu kesatuan yang mengancam Australia dan “ditolak di perbatasan”¹⁰. Narasi ancaman digunakan untuk mendapatkan

⁶ Michael Welch. “The Sonic Of Crimmigration in Australia :Wall of Noise and Quiet Manouvering”. 2011. *The British Journal of Criminology*, Volume 52, Issue 2, March 2012, Pages 324–344,

⁷ Diakses melalui <https://ourworldindata.org/grapher/refugee-population-by-country-or-territory-of-origin>

⁸ Richard Parsons. “Refugees: Economic Burden or Opportunity?”. 2016. <https://www.e-ir.info/2016/03/07/refugees-economic-burden-or-opportunity/>

⁹ Diakses melalui <https://www.abc.net.au/news/2015-12-09/tony-abbott-defends-controversial-2014-budget/7012190>

¹⁰Heela Popal. “Analysing the Rhetoric of Islam Needs Reforming: Tony Abbott’s Political Discourse in Response to Terrorism in Australia”. *Religions* 2023, 14, 1358.<https://doi.org/10.3390/rel14111358>

dukungan publik, yang memungkinkan mereka yang memiliki kekuasaan untuk menangani isu tersebut dengan cara yang mereka anggap paling sesuai.¹¹

Dalam konteks ini, langkah-langkah keamanan merupakan respons negara yang berkaitan dengan identitas dan kepentingan mereka, yang pada akhirnya terkait dengan berbagai faktor emosional¹². Seperti pemikiran Arthur Vandenberg (mantan Senator A. S) yang menyatakan bahwa ketika seseorang melihat sebuah negara sebagai entitas yang bersatu dan rasional yang peduli terhadap keamanannya sendiri, maka implikasi dalam kebijakan luar negeri adalah "politik berhenti di tepi laut", yang menunjukkan bahwa pada isu keamanan, para politisi menyingkirkan perbedaan mereka¹³. Namun nyatanya idiom ini terbantahkan ketika mengamati isu keamanan dan perlindungan perbatasan terhadap imigran di Australia. Definisi masalah serta penetapan agenda kebijakan sejatinya adalah hasil dari persaingan antara berbagai kelompok berbeda¹⁴.

Baik masalah keamanan maupun ketidakamanan tidaklah bersifat 'alami', melainkan merupakan sesuatu yang dibentuk oleh para aktor politik¹⁵. Tidak semua isu dikategorikan sebagai ancaman keamanan; topik-topik tersebut perlu dipresentasikan sebagai ancaman yang mendasar terhadap objek referensi oleh aktor-aktor keamanan, sehingga menghasilkan dukungan untuk tindakan darurat

¹¹ Thierry.balzacq@defense.gouv.fr, Sarah Léonard, and Jan Ruzicka. "Securitization' Revisited: Theory and Cases". 2015. <https://doi.org/10.1177/0047117815596590>

¹² ROLAND BLEIKER AND EMMA HUTCHISON. "Fear No More: Emotions and World Politics". 2008. *Review of International Studies*, 34, 115–135 Copyright British International Studies Association doi:10.1017/S0260210508007821

¹³ MARK SOUVA. "Foreign Policy Determinants: Comparing Realist and Domestic-Political Models of Foreign Polic". *Conflict Management and Peace Science* Vol. 22, No. 2 (Summer 2005), pp. 149-163 (15 pages) Published By: Sage Publications, Ltd.

¹⁴ Kurniawati, Dyah Estu. "Pendekatan Intermestik Dalam Proses Perubahan Kebijakan: Sebuah Review Metodologis". 2012. *Jurnal Studi Hubungan Internasional (JSHI)* Vol 2 No 2 (2012). Diakses 12 Agustus 2017 pada <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jshi/article/view/1519/1623>

¹⁵ Ronald R. Krebs. "The Politics of National Security". 2018. *The Oxford Handbook of International Security*. DOI: 10.1093/oxfordhb/9780198777854.013.42

yang melanggar norma yang seharusnya mengikat¹⁶. "Penolakan di perbatasan" dibingkai oleh Partai Buruh dalam konteks keperluan untuk menghindari pencari suaka mempertaruhkan hidup mereka di laut, sementara sebagian besar pencari suaka yang telah sampai di Australia diarahkan untuk mendapatkan perlindungan karena tindakan keras dari Koalisi, tetapi bagi Koalisi Partai Liberal-Nasional, kedatangan kapal dikecam secara luas sebagai ancaman terhadap ketertiban publik dan keamanan nasional¹⁷. Dengan demikian isu imigran merupakan isu yang dipolitisasi Koalisi dengan melakukan disinformasi terhadap imigran.

Secara spesifik, informasi yang keliru (disinformasi) dalam propaganda, fabrikasi yang bersifat anti-imigran dikaitkan dengan kelompok populisme sayap kanan, ekstremis kanan, serta *influencer alt* kanan¹⁸. Jenis informasi keliru ini bisa muncul dalam bentuk pernyataan mengenai keamanan dan kebijakan-kebijakan yang mendasarkan diri pada ketakutan sebagai alat utama untuk membedakan dan memisahkan individu yang dianggap "berbahaya"¹⁹. Ketakutan juga menjadi sumber yang signifikan untuk mendukung dasar-dasar politik dan moral secara bersama. Ketakutan berperan penting dalam membentuk pandangan masyarakat dan memandu posisi politik serta kebijakan hukum²⁰.

¹⁶ Futoon Al Mahruqi. "Racism and The Politics of Fear at the US-Mexico Border". 2020. <https://www.e-ir.info/2020/07/08/racism-and-the-politics-of-fear-at-the-us-mexico-border/>

¹⁷ Daniel Ghelzelbash, Mary Crock. "Asylum Seeker and Refugee Policy in Australia Under The Abbott Government". 2013. <https://www.e-ir.info/2013/10/30/asylum-seeker-and-refugee-policy-in-australia-under-the-abbott-government/>

¹⁸ Eileen Culloty, Jane Suiter. "Anti-Immigration Disinformation". 2021. *International Organization for Migration 17 route des Morillons P.O. Box 17 1211 Geneva 19 Switzerland*

¹⁹ Nadera Shalhoub-Kevorkian. "INTRODUCTION: SETTLER COLONIALISM, THE POLITICS OF FEAR AND SECURITY THEOLOGY". 2015. Cambridge University Press 978-1-107-09735-3 - *Security Theology, Surveillance and the Politics of Fear*

²⁰ Andrea Bianchi, Anne Saab. "Fear and The Making of International Law: An Exploratory Inquiry". 2019. *Leiden Journal of International Law* 32, 351–365
doi:10.1017/S0922156519000177

Hal ini terbukti dengan keberhasilan Koalisi Partai Liberal-Nasional Australia yang mengangkat platform yang mencakup komitmen untuk menghentikan kedatangan perahu²¹. Bahkan setelah masa jabatannya, Abbott menyarankan strategi serupa sebagai salah satu upaya memenangkan suara pemilu²². Dalam dua periode berikutnya, mereka juga berhasil memenangkan pemilihan di Australia. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pandangan mengenai keamanan dalam konteks imigrasi yang diarahkan pada kelompok pengungsi dan pencari suaka, merupakan taktik politik dari Koalisi Partai Liberal-Nasional dan bukan sekadar masalah keamanan nasional. Untuk itu, perlu dianalisis bagaimana mereka memanfaatkan ketakutan dalam gagasan keamanan tersebut agar dapat mengubah tindakan yang bertentangan dengan norma internasional menjadi sesuatu yang dianggap wajar dan juga memperkuat posisi mereka.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan di latar belakang, dapat ditarik kesimpulan bahwa isu keamanan terhadap imigran merupakan tren yang meluas di negara-negara “Barat” dengan populisme sayap kanannya. Dengan mengambil contoh di Australia, dapat dilihat bahwa keamanan terhadap imigran

²¹ Daniel Ghelzelbash, Mary Crock. “Asylum Seeker and Refugee Policy in Australia Under The Abbott Government”. 2013. <https://www.e-ir.info/2013/10/30/asylum-seeker-and-refugee-policy-in-australia-under-the-abbott-government/>

²² <https://www.theguardian.com/australia-news/2018/feb/20/tony-abbott-to-call-for-immigration-cut-in-speech-targeting-political-elites>

bukanlah semata-mata langkah keamanan, melainkan isu yang ditonjolkan demi kepentingan politik. Elemen emosi khususnya ketakutan digunakan dalam isu keamanan terhadap imigran yang dilakukan oleh Koalisi Partai Liberal-Nasional. Kesuksesan yang dilakukan oleh Koalisi Partai Liberal Nasional ini bisa dilihat dari kemenangan masing-masing PM yang diusung mereka. Output terpilihnya para PM tersebut adalah kebijakan imigrasi yang ketat oleh pemerintahan yang diduduki Koalisi Partai Liberal Nasional.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berkaitan dengan latar belakang penelitian diatas, muncul pertanyaan yang mengacu pada pertanyaan “bagaimana penggunaan ketakutan dalam isu keamanan terhadap imigran oleh Koalisi Partai Liberal-Nasional Australia?”

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana penggunaan ketakutan dalam isu keamanan terhadap imigran oleh Koalisi Partai Liberal-Nasional Australia.



1.5. Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan kemampuan peneliti maupun pembaca dalam bidang Hubungan internasional khususnya pada bidang konstruksi negatif terhadap pencari suaka.

1.5.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat diharapkan menjadi sumber informasi bagi publik baik itu kalangan penstudi ilmu hubungan internasional maupun bagi semua kalangan secara umum, terutama dalam melihat proyeksi pengungsi dan pencari suaka sebagai kategori imigran oleh pemerintah. Serta dapat menjadi sumber informasi bagi pemerintah dalam memutuskan tindakan yang tepat khususnya mengenai pencari suaka.

1.6 Kajian Pustaka

Studi pustaka pertama adalah artikel dengan judul “*Categorising anti-asylum Seeker Sentiment through a Regime of Securitisation*” yang ditulis oleh Rachel Sharples, Kevin M. Dunn, dan Thierno M.O. Diallo pada tahun 2022. Artikel ini menawarkan tinjauan makro mengenai situasi terkini terkait pandangan masyarakat terhadap pencari suaka di Australia. Agenda sekuritisasi mengandung

elemen kebijakan dan diskusi. Selama dua dekade terakhir, sebagian besar penduduk Australia menerapkan kebijakan ketat terhadap pencari suaka, yang tercermin dari penggunaan bahasa negatif dan hukuman dalam retorika mereka. Agenda ini memanfaatkan kekhawatiran yang ada mengenai imigrasi, penghapusan hak suara, dan isu rasisme.

Artikel ini mengungkapkan bahwa tindakan serta diskursus pemerintah terhadap pencari suaka mendapatkan dukungan signifikan dari masyarakat mengenai kebijakan tersebut. Tiga perempat populasi pada tahun 2022 mendukung agenda keamanan terkait pencari suaka. Pemerintah terbukti berhasil dalam mengedepankan isu keamanan dalam diskusi publik tentang pencari suaka. Isu keamanan perbatasan terhadap imigran ilegal diakui sebagai kepentingan nasional, menjadi alat penting bagi pemerintah untuk melindungi warga dari ancaman yang dianggap ada.

Dalam berbagai aspek, perpaduan antara diskursus dan kebijakan telah menjadi senjata ampuh bagi pemerintah. Pemerintah mengarahkan narasi dengan menciptakan isu bahwa terdapat "sekumpulan individu yang berusaha menembus batasan secara ilegal untuk menetap di Australia." Sebagai respons, mereka memperkenalkan langkah-langkah imigrasi yang lebih ketat dan pengawasan perbatasan untuk mencegah masuknya orang-orang yang dianggap "bermasalah", serta untuk mengurangi potensi ancaman terhadap masyarakat Australia. Temuan ini menunjukkan bahwa pencari suaka telah dimanfaatkan sebagai alat politik untuk mendukung agenda sekuritisasi pemerintah.

Melihat profil sikap di atas, mengubah pandangan terhadap kebijakan pencari suaka akan menjadi suatu tantangan. Namun, penting untuk dicatat bahwa terdapat perasaan simpati yang mendalam terhadap pencari suaka, yang dapat menggerakkan sudut pandang kritis terhadap kebijakan pemerintah, meskipun mereka mungkin menghadapi penahanan sementara. Intervensi yang lebih mendukung bagi pencari suaka sangat dibutuhkan dan diyakini akan memberikan dampak paling signifikan. Dalam artikel ini, ditemukan bahwa sentimen anti-Muslim merupakan indikator terkuat kedua setelah penolakan terhadap hak istimewa yang diperuntukkan bagi individu di luar kelompok Pro-Pencari Suaka.

Mekanisme kuncinya adalah sebagai penentang undang-undang, representasi rasial dari warga Afrika, Timur Tengah, dan Muslim Australia. Namun menurut artikel ini ada harapan agar migran lebih diterima di Australia. Pandangan yang lebih kritis terhadap pendekatan kebijakan pemerintah yang bersifat diskursif dan konstruksi media terhadap isu ini akan sangat penting untuk mencapai hal ini. Artikel ini menunjukkan sekutu-sekutu utama untuk memperkuat kelompok yang pro-pencari suaka kelas akan ditemukan pada kelompok yang lebih muda (18–25 tahun) dan mereka yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi.

Kesamaan artikel ini dengan penelitian saya adalah sama-sama membahas isu keamanan, imigrasi, Australia. Sedangkan pembeda artikel ini dengan penelitian saya adalah dalam artikel ini, penulis menggunakan konsep sekuritisasi dan melihatnya melalui perspektif realisme dalam melihat tindakan pemerintah baik itu kebijakan ataupun representasi terkait pencari suaka. Namun dalam artikel tersebut tidak ditemukan penjelasan mengenai penggunaan ketakutan yang

cenderung lebih ditekankan oleh koalisi partai liberal dan juga digunakan berkali-kali oleh mereka. Oleh itu penelitian saya berusaha menggambarkan fenomena tersebut dengan konsep *The Politics Of Fear* .

Studi pustaka kedua adalah artiker berjudul "*Illegal Criminals Invading*': *Securitising Asylum Seekers in Australia and the US*" yang ditulis oleh Anon tahun 2020. Dalam artikel ini, diungkapkan tindakan-tindakan yang mengejutkan, seperti pengabaian hukum pengungsi secara global dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, serta perlakuan kejam terhadap mereka yang melarikan diri dari penganiayaan, yang sangat ekstrem. Tindakan-tindakan ini melanggar perjanjian internasional dan menimbulkan dampak psikologis serta fisik bagi individu yang mencari perlindungan. Dari tindakan ini, dapat disimpulkan bahwa Australia dan Amerika Serikat tidak memberikan kesempatan bagi pencari suaka untuk mendapatkan penilaian yang adil dan menyeluruh mengenai kasus mereka, sehingga tidak memenuhi kewajiban hukum internasional dalam melindungi pengungsi.

Hal ini memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana kebijakan ini dapat terus berlangsung tanpa mendapat respons yang kuat, serta bagaimana masyarakat menerima retorika yang bersifat sekuritisasi. Para ahli dalam sekuritisasi gelombang kedua berpendapat bahwa hanya adanya narasi saja tidak cukup untuk mengakibatkan sekuritisasi. Sebaliknya, harus ada kondisi tertentu yang memungkinkan ancaman dipercaya. Penerimaan masyarakat terhadap retorika keamanan sangat penting dalam kekuatan yang dimilikinya, tetapi kondisi apa yang membuat individu lebih mudah terpengaruh oleh retorika tersebut?

Anon membahas pendapat McDonald (2008) yang menyoroti bagaimana saat krisis politik dapat memengaruhi sekuritisasi. Meningkatnya rasa khawatir di masyarakat tentang migrasi serta peran 'krisis migrasi' pada tahun 2015 di Eropa menjadi faktor penting. Jumlah pencari suaka mencapai puncaknya sejak Perang Dunia Kedua, dengan sekitar 1,8 juta pengungsi tiba di Eropa sejak tahun 2015. Masalah migrasi telah mendominasi diskursus politik, dengan ide tentang "gelombang pencari suaka" dari Suriah, Afghanistan, dan Irak yang merangsang narasi populis.

Walaupun AS dan Australia tidak terlalu terpengaruh oleh krisis tersebut, proses sekuritisasi pencari suaka sejalan dengan sikap populis dan antimigrasi di Hongaria, Italia, dan Jerman ("Eropa dan Nasionalisme, 2018"). Konstruksi krisis ini memberikan justifikasi bagi tuntutan kebijakan dan retorika yang menyerukan tindakan segera. Isu yang disajikan sebagai masalah keamanan dalam narasi elite politik menjadi jawaban yang efektif untuk ketakutan masyarakat, sekaligus memperburuk ketakutan tersebut, sehingga menciptakan siklus yang sulit diatasi.

Dalam tulisan ini, dijelaskan tindakan-tindakan mencolok seperti mengabaikan regulasi pengungsi internasional serta prinsip-prinsip hak asasi manusia, perlakuan yang kejam terhadap individu yang melarikan diri dari penganiayaan, dan dalam bentuk yang sangat ekstrem. Tindakan tersebut melanggar perjanjian internasional dan berdampak negatif secara psikologis serta fisik bagi mereka yang mencari perlindungan. Dari tindakan ini, tampak bahwa Australia dan Amerika Serikat tidak memberikan kesempatan kepada pencari suaka untuk mendapatkan evaluasi yang adil dan menyeluruh mengenai kasus

mereka, sehingga tidak memenuhi kewajiban mereka menurut hukum internasional untuk melindungi pengungsi.

Hal ini memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana kebijakan tersebut terus berjalan tanpa reaksi yang signifikan, dan bagaimana masyarakat menerima retorika yang menjadikan isu ini sebagai ancaman. Para teoretikus sekuritisasi gelombang kedua berpendapat bahwa hanya dengan adanya pernyataan saja tidak cukup untuk mewujudkan sekuritisasi. Sebaliknya, kondisi yang tepat harus ada agar ancaman tersebut dianggap nyata. Penerimaan audiens terhadap narasi keamanan menjadi krusial dalam efektivitasnya, namun kondisi seperti apa yang membuat masyarakat lebih rentan terhadap narasi ini?

Anon membahas argumen dari McDonald (2008) yang menjelaskan bagaimana periode krisis politik yang dirasakan dapat mempengaruhi sekuritisasi. Meningkatnya kecemasan di masyarakat terkait migrasi dan peran 'krisis migrasi' pada tahun 2015 di Eropa berkontribusi dengan signifikan. Jumlah pencari suaka mencapai puncaknya sejak Perang Dunia Kedua, di mana sekitar 1,8 juta pengungsi tiba di Eropa setelah 2015. Isu migrasi menjadi bagian utama dalam retorika politik, dengan konsep "gelombang pencari suaka" dari Suriah, Afghanistan, dan Irak yang mendorong retorika populis.

Walaupun AS dan Australia tidak terlalu terpengaruh oleh krisis ini, sekuritisasi pencari suaka mencerminkan tren populis dan penolakan terhadap migrasi di negara-negara seperti Hongaria, Italia, dan Jerman ("Eropa dan Nasionalisme, 2018"). Penafsiran mengenai krisis tersebut membenarkan tuntutan kebijakan dan narasi yang mendesak tindakan segera. Isu yang disajikan sebagai

masalah keamanan dalam retorika kalangan elit politik dapat menjadi respons yang diterima masyarakat terhadap rasa ketakutan, sekaligus memperparah ketakutan tersebut, sehingga menciptakan siklus yang sulit untuk diputus.

Diskusi terbaru mengenai ‘Berita Palsu’, terutama di Amerika Serikat, menguatkan pemahaman bahwa ancaman tidak perlu nyata untuk dianggap signifikan. Meningkatnya ketidakpercayaan terhadap media informasi dan misinformasi mengakibatkan ancaman yang dibayangkan lebih mungkin diterima, dan pencari suaka lebih cenderung dilihat sebagai ancaman meskipun sebenarnya tidak demikian. Kekuatan narasi identitas menjadi faktor penting dalam sekuritisasi. Narasi identitas ini membuat masyarakat lebih terbuka terhadap retorika yang memosisikan isu sebagai ancaman.

Kesamaan tulisan ini dengan penelitian saya adalah topik yang dibahas sama-sama berhubungan dengan isu keamanan, Australia, dan Imigrasi. Namun Anon tidak secara gamblang menjelaskan mengenai pelaku serta motif pelaku sekuritisasi ini dan memasukkan elemen ketakutan akan migran hanya sebatas pada wacana yang dibuat oleh pemerintah dan media tanpa menggali lebih dalam bagaimana ketakutan tersebut diolah oleh pemerintah khususnya actor politik yang berkuasa. Sedangkan dalam penelitian saya, ditegaskan mengenai pihak yang meng-sekuritisasi imigran yang merujuk pada kategori pengungsi dan pencari suaka, dan saya akan secara jelas menjabarkan ketakutan yang dimobilisasi pihak tersebut dan dampaknya pada audiens.

Studi pustaka ketiga adalah artikel dengan judul “The Vulnerability of Securitisation: The Missing Link of Critical Security Studies” oleh Tadek

Markiewicz yang dipublikasikan pada 2023. Dalam artikel ini Markiewicz menyajikan sekuritisasi sebagai era pengungkit entitas kuat yang secara pragmatis dan sinis menggunakan ketakutan orang. Ia menulis tentang memburuknya supremasi hukum di seluruh Uni Eropa, laporan Amnesty International tentang keamanan nasional menyimpulkan bahwa sejak 2014 politik sekuritisasi telah membentuk 'dunia di mana ketakutan, keterasingan, dan prasangka terus menggerogoti batu penjuruan UE: keadilan, kesetaraan, dan non-diskriminasi'.

Berdasarkan analisis mendalam terhadap pemahaman sekuritisasi oleh Balzacq, yang mengatur teori generatif mengenai alasan di balik tindakan aktor dalam melakukan sekuritisasi, situasi yang membuat langkah keamanan berhasil, serta dampak dari sekuritisasi itu sendiri, Markiewicz menemukan bahwa dasar sekuritisasi adalah kerentanan. Artikel ini menunjukkan fenomena ini melalui contoh-contoh pidato politik yang mengaitkan sekuritisasi dengan narasi kerentanan yang lebih luas dan ketakutan masyarakat. Gambaran skenario apokaliptik dalam langkah-langkah keamanan mencerminkan sifat intersubjektif dari sekuritisasi. Kombinasi antara skenario apokaliptik dan sudut pandang keamanan oleh kalangan elit menunjukkan bahwa tindakan keamanan dapat berhasil dibangun atas dasar persepsi ketakutan bersama.

Kerentanan ini menjadi fondasi bagi ketakutan terhadap ancaman. Markiewicz menyatakan bahwa isu ancaman dan ketakutan menjadi sorotan utama dalam diskusi mengenai imigrasi, terorisme, Brexit, hak-hak minoritas, dan kebijakan lingkungan. Pembahasan biopolitik menurut Foucault (jenis kekuasaan politik yang mengatur masyarakat dengan mengelola berbagai aspek kehidupan mereka dan memandang mereka sebagai entitas "biologis" yang perlu

dikendalikan dan dioptimalkan) juga menghubungkan ketakutan dengan kebijakan keamanan kontemporer.

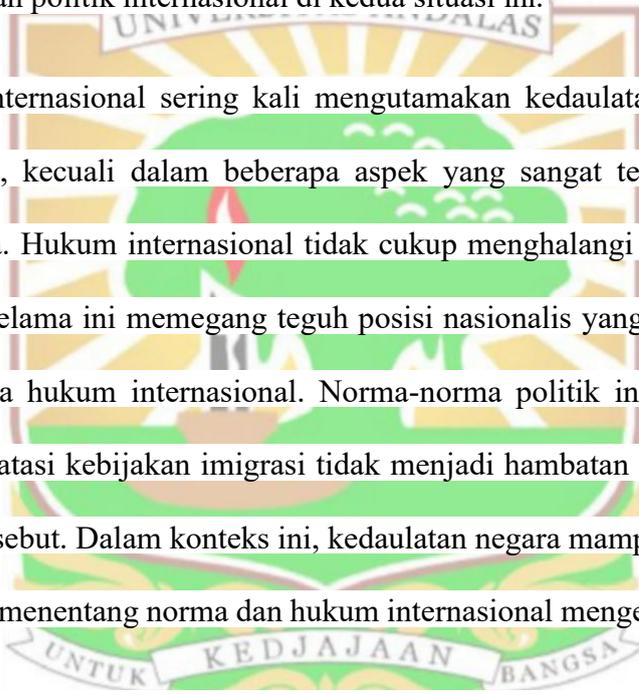
Dengan demikian, tindakan keamanan dianggap berhasil bila langkah-langkah tersebut mampu secara efektif menangani ketakutan yang ada. Ketakutan kolektif menjadi landasan dan pendorong utama sekuritisasi. Peran kerentanan yang mendorong ketakutan dalam kebijakan keamanan menjadi argumen bagi analisis yang lebih menyeluruh terkait pengaruh elit politik dalam proses pengidentifikasian ancaman. Hal ini menekankan bahwa dari sudut pandang pelaku sekuritisasi, tindakan sekuritisasi merupakan respon terhadap kekhawatiran kolektif yang cukup mendalam.

Kesamaan artikel ini dengan penelitian saya adalah sama-sama membahas imigrasi, isu keamanan dan penggunaan ketakutan. Perbedaan artikel saya dan penelitian ini adalah artikel ini berfokus di Uni Eropa, sedangkan penelitian saya difokuskan pada Australia.

Studi pustaka keempat adalah artikel dengan judul “Norm-busting: rightist challenges in US and Australian immigration and refugee policies” oleh David Scott Fitz Geralda dan Asher Hirsch publikasi tahun 2020. Artikel ini membahas kebijakan partai Republik A.S tahun 2016–2020 dan Koalisi Liberal-Nasional Australia tahun 2013–sekarang yang menimbulkan keraguan serius tentang seberapa jauh lembaga diskursif dan hukum di tingkat domestik dan internasional yang melakukan upaya pembatasan yang keras terhadap imigrasi dan suaka, bahkan dalam masyarakat pemukim liberal-demokratis klasik AS dan Australia.

Melawan anggapan tentang 'peradilan liberal' dan 'diskursus institusional', pemerintahan sayap kanan di kedua negara ini melakukan pengurangan norma

terkait otonomi peradilan, perlakuan adil tanpa diskriminasi berdasarkan etnis dan agama, serta prinsip non-refoulement. Politikus yang menolak pola pikir dominan mengenai kepatuhan memiliki ruang yang luas untuk melakukan inovasi serta menerapkan batasan ketat pada imigrasi. Para perumus kebijakan imigrasi meremehkan berbagai norma yang berkaitan dengan komunikasi politik, legitimasi media yang bebas, hak-hak konstitusi, dan pemisahan kekuasaan. Sejalan dengan teori realis, pelanggaran norma dapat terjadi karena kelemahan dalam hukum dan politik internasional di kedua situasi ini.



Hukum internasional sering kali mengutamakan kedaulatan negara dalam isu-isu imigrasi, kecuali dalam beberapa aspek yang sangat terbatas mengenai kebijakan suaka. Hukum internasional tidak cukup menghalangi sistem peradilan nasional yang selama ini memegang teguh posisi nasionalis yang umumnya tidak bergantung pada hukum internasional. Norma-norma politik internasional yang biasanya membatasi kebijakan imigrasi tidak menjadi hambatan signifikan dalam kedua kasus tersebut. Dalam konteks ini, kedaulatan negara mampu mengalihkan, meskipun tidak menentang norma dan hukum internasional mengenai pengungsi.

Setelah Pelapor Khusus PBB menemukan bahwa Australia telah melanggar hak-hak pencari suaka, mantan Perdana Menteri Tony Abbott menyatakan bahwa masyarakat Australia 'jenuh dengan ceramah dari PBB'. Meskipun terdapat reaksi negatif dari perhatian publik internasional mengenai intersepsi maritim dan pemrosesan di luar pantai untuk mencegah pencari suaka, banyak pemimpin Eropa justru berusaha meneladani, bukannya mengutuk, pendekatan Australia, yang sebelumnya terinspirasi oleh kebijakan AS. Perlombaan global untuk mencegah pencari suaka yang tidak diinginkan dari Global South menunjukkan

bahwa pelanggaran norma oleh satu negara telah menyebar ke seluruh Global North dan tidak menimbulkan dampak negatif yang berarti dari negara lain. Ketika norma mengalami pelanggaran di seluruh dunia, mereka menjadi kurang mengekang dalam situasi tertentu.

Hakim imigrasi, yang memperkerjakan anggota Departemen Kehakiman, bahkan lebih sedikit kemungkinannya untuk membatasi tindakan eksekutif. Pengadilan telah memberikan sedikit batasan pada kebijakan imigrasi dan suaka yang diterapkan Australia. Penekanan pada kedaulatan parlemen telah memungkinkan Koalisi untuk menghindari tantangan hukum dengan meluluskan undang-undang yang bersifat retrospektif. Struktur kelembagaan yang memungkinkan pemerintah untuk mengesahkan amandemen semacam itu, telah membatasi kemampuan pengadilan untuk mempertimbangkan tanggung jawab hukum internasional atau hak-hak umum.

Akibatnya, pengadilan menjadi cukup lemah dalam kapasitas mereka untuk menegakkan norma-norma tersebut. Protes massal dan advokasi isu di kedua negara telah secara signifikan menyebarkan narasi dan simbol terkait kewarganegaraan imigran. Namun, wacana yang mendukung bangsa-bangsa imigran tidak berada dalam ruang kosong norma, dan bahkan dalam masyarakat pemukim yang telah lama berdiri, mereka dapat ditantang oleh berbagai bentuk nasionalisme dan sekuritisasi yang lebih eksklusif. Berlawanan dengan pandangan Freeman, tulisan ini menunjukkan bahwa media dan partai-partai sayap kanan telah memperlebar batas-batas wacana yang sah mengenai imigrasi.

Kesamaan artikel ini dengan penelitian saya adalah sama-sama membahas imigrasi, koalisi partai liberal, Australia. Perbedaan artikel ini dengan penelitian saya adalah artikel ini membahas mengenai norma dalam isu imigrasi, baik itu norma yang dilanggar dan juga pengintegrasian norma yang dibawa oleh actor. Sedangkan penelitian saya berfokus pada penggunaan ketakutan dalam isu kemanan terhadap imigran yang dilakukan oleh koalisi partai liberal.

Studi pustaka kelima adalah artikel dengan judul “*Boat People' and Discursive Bordering: Australian Parliamentary Discourses on Asylum Seekers, 1977-2013*” yang ditulis oleh John van Kooy, Liam Magee and Shanthi Robertson.

Dalam artikel ini, dijelaskan bahwa saat ini, migrasi melalui perahu (manusia perahu) memiliki makna yang bertentangan antara migran yang sangat rentan dan yang sangat dicurigai. Istilah manusia perahu merujuk pada individu yang mencari pengungsi ke negara-negara penerima dengan memanfaatkan kapal atau perahu. Di Australia, penggambaran negatif tentang manusia perahu dilakukan dengan berbagai cara. Berbeda dengan mereka yang bepergian menggunakan pesawat, "manusia perahu" mencoba memasuki wilayah negara lain "secara diam-diam. "

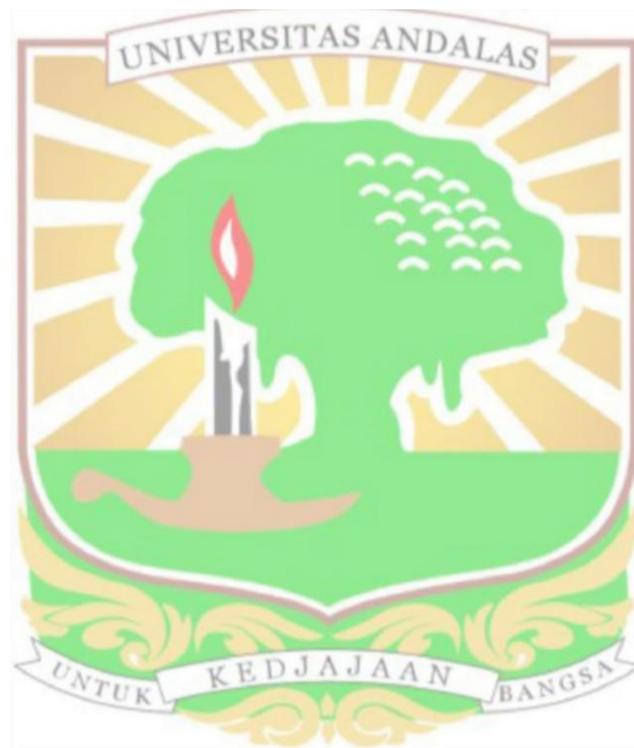
Meskipun ada perbedaan regional yang signifikan, penggabungan konsep-konsep ini ke dalam bahasa pemerintah yang lebih luas seperti sekuritisasi, privatisasi, logistik, dan "solusi" tampaknya merupakan hal yang umum dalam tindakan banyak negara. Argumen global saat ini tentang pengendalian perbatasan dan pengaturan migrasi yang menekankan kebebasan bergerak bagi warganya, di samping aturan yang "ketat namun berbasis kemanusiaan," sebagian besar

merupakan "Harapan" dalam manajemen migrasi. Mengingat jumlah migran yang sedikit dibandingkan dengan kategori imigrasi lainnya, ketertarikan politik terhadap manusia perahu di Australia membuat istilah ini memiliki pengaruh yang tidak sebanding dalam diskusi kebijakan publik.

Contohnya, pencari suaka terus menerus tercatat sebagai tiga isu teratas yang dibahas dalam sesi tanya jawab di parlemen antara tahun 2010 dan 2013, yang menunjukkan dominasi mereka di ruang publik. Dominasi ini mendorong dan didukung oleh sumber daya ekonomi dan politik yang dihasilkan dari isu tersebut di media dan parlemen, di mana isu ini dapat berfungsi sebagai alat strategis yang penting untuk meraih kemenangan dalam pemilu serta menegaskan kedaulatan nasional kepada masyarakat lokal dan negara tetangga di kawasan. Ini menunjukkan bagaimana praktik pengawasan perbatasan telah berkembang dan semakin ketat, karena banyak negara di Dunia Utara dan Dunia Selatan yang mengalami peningkatan, berusaha untuk menegaskan kembali kekuatan kedaulatan perbatasan dengan menyalahkan kelompok imigran yang "tidak diinginkan." Di Australia, meskipun pendekatan bipartisan terhadap sistem perbatasan semakin meningkat, strategi politik yang dominan terhadap pencari suaka, seperti penahanan di luar negeri, tetap mendapat tantangan.

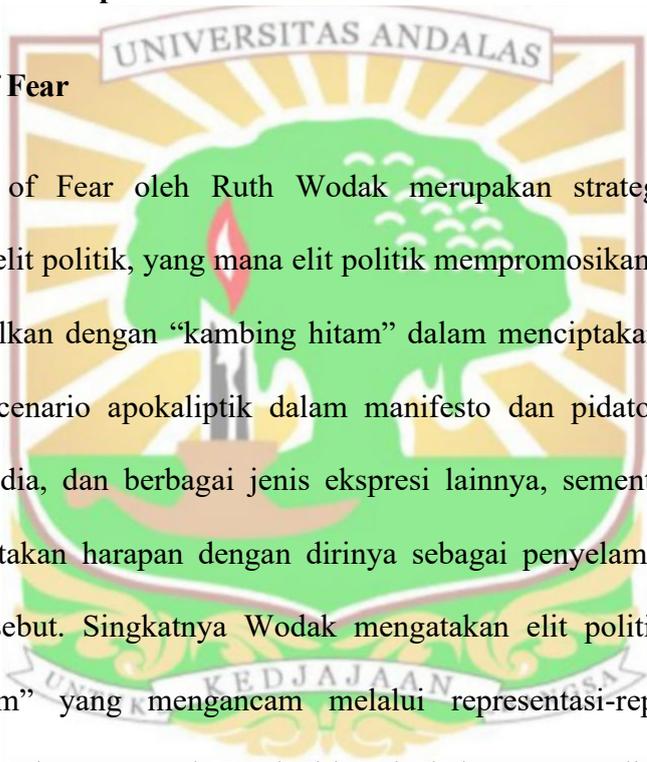
Kesamaan artikel ini dengan penelitian saya adalah sama-sama membahas imigrasi (pencari suaka), isu keamanan dan Australia. Sedangkan perbedaan artikel ini dengan penelitian saya adalah artikel ini berusaha memperlihatkan realitas yang berbeda dari diskursus negative pencari suaka oleh pemerintah, kemudian juga menunjukkan tindakan perlindungan perbatasan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai langkah yang tidak efektif bahkan merugikan.

Sedangkan penelitian saya berfokus dalam melihat bagaimana ketakutan digunakan dalam isu keamanan terhadap imigran.



1.7 Kerangka Konsep

The Politics Of Fear



Politics of Fear oleh Ruth Wodak merupakan strategi politik yang dilakukan oleh elit politik, yang mana elit politik mempromosikan teori konspirasi liar yang diusulkan dengan “kambing hitam” dalam menciptakan ketakutan dan menyebarkan scenario apokaliptik dalam manifesto dan pidato, poster, debat, wawancara, media, dan berbagai jenis ekspresi lainnya, sementara di satu sisi mereka menciptakan harapan dengan dirinya sebagai penyelamat atas scenario apokaliptik tersebut. Singkatnya Wodak mengatakan elit politik mengusulkan “kambing hitam” yang mengancam melalui representasi-representasi yang membangun ketakutan untuk melegitimasi kekuasaan politiknya. Industri ketakutan menciptakan peluang baru bagi elit politik untuk ber-manuver, dan

untuk promosi pejabat tertentu²³. Pada akhirnya, ketakutan bekerja sebagai alat untuk membentuk sentimen publik dan membimbing posisi politik serta hukum²⁴.

Pemilihan umum 2014 hingga pemilihan Parlemen Eropa 2019, menjadi titik potong Wodak untuk dalam konsep ini. Wodak melihat bahwa kebijakan, wacana dan retorika yang sebelumnya 'tabu', kini dianggap oleh banyak orang sebagai 'normal' daripada 'ekstrem' atau 'marginal'. Oleh karena itu, terjadi beragam kecenderungan renasionalisasi di seluruh UE dengan kecenderungan untuk menciptakan batas-batas dan tembok-tembok baru, menghubungkan negara bangsa dengan *body politic* nativis, misalnya, di AS, Yunani, Italia, Polandia, Austria, Inggris, Hungaria, serta Ukraina. Pada saat yang sama, tembok-tembok sedang dibangun untuk menahan 'others' yang digambarkan sebagai berbeda dan menyimpang.

Wodak melihat fenomena ini terjadi karena partai populis sayap kanan kini telah masuk ke arus utama dengan agenda mereka yang telah memengaruhi banyak partai lain dan akhirnya mendukung sayap kanan yang mendorong mereka untuk semakin jauh bergeser ke aliran kanan politik. Dalam hal ini populis sayap kanan menggunakan ketakutan sebagai alat untuk membenarkan fondasi politik dan moral kolektif²⁵. Ketakutan dan kekuasaan dalam modernitas yang dipemerintahkan semakin mendorong populis untuk memobilisasi momok bahaya,

²³ Nadera Shalhoub-Kevorkian. "INTRODUCTION: SETTLER COLONIALISM, THE POLITICS OF FEAR AND SECURITY THEOLOGY". 2015. Cambridge University Press 978-1 107-09735-3 - Security Theology, Surveillance and the Politics of Fear

²⁴ Andrea Bianchi, Anne Saab. "Fear and The Making of International Law: An Exploratory Inquiry". 2019. Leiden Journal of International Law 32, 351–365
doi:10.1017/S0922156519000177

²⁵ ROLAND BLEIKER AND EMMA HUTCHISON. "Fear No More: Emotions and World Politics". 2008. Review of International Studies, 34, 115–135 Copyright British International Studies Association doi:10.1017/S0260210508007821

ancaman, ketidakamanan, dan permusuhan²⁶. Selain itu, menurut Wodak keberhasilan populis sayap kanan juga disebabkan oleh faktor media yang mana interdependensi yang kompleks antara media, krisis, skandalisasi dan politik ketakutan (dan ancaman) adalah elemen yang diperlukan dan konstitutif untuk kebangkitan partai-partai populis sayap kanan.

Menurut Wodak untuk mengamati penyebaran ketakutan oleh populis sayap kanan, perlu dipahami representasinya mengenai isu yang membentuk dikotomi dunia. Representasi adalah proses di mana emosi individu memperoleh dimensi kolektif yang pada gilirannya membentuk proses sosial dan politik²⁷. Representasi ini dilakukan dengan mempromosikan disinformasi, baik dalam penyebaran 'fakta alternatif' maupun 'kebenaran palsu', yang dikisahkan oleh populis sayap kanan, kemudian dikisahkan kembali oleh media sayap kanan. Representasi populis sayap kanan disini menghasilkan dikotomi yang membelah dunia menjadi dua kelompok “*we*” dan “*others*”.

Masyarakat ideologis dengan rasa identitas yang kuat dalam pandangan “*we*” dan “*others*” yang kontras dan terpolarisasi, akan memengaruhi posisi mereka terhadap sistem yang terkait dengan beberapa lingkungan budaya lainnya²⁸. Dengan kata lain, populis memberi tahu kita nilai-nilai dan identitas kita

²⁶ Eric Van Rythoven (2017): Fear in the crowd or fear of the crowd? The dystopian politics of fear in international relations, *Critical Studies on Security*, DOI: 10.1080/21624887.2017.1377527

²⁷ ROLAND BLEIKER AND EMMA HUTCHISON. “Fear No More: Emotions and World Politics”. 2008. *Review of International Studies*, 34, 115–135 Copyright British International Studies Association doi:10.1017/S0260210508007821

²⁸ Holger Mölder. “THE CULTURE OF FEAR IN INTERNATIONAL POLITICS – A WESTERN-DOMINATED INTERNATIONAL SYSTEM AND ITS EXTREMIST CHALLENGES”. 2011. *ENDC Proceedings*, Volume 14, 2011, pp. 241–263. <http://www.ksk.edu.ee/toimetised>

dengan memberi tahu kita siapa musuh dan siapa bukan²⁹. Wodak memetakan representasi “we” dan “others” oleh Populis yang mengandung sejumlah makna, yang dijabarkan dalam gambar 1.1



Gambar 1.1 Kamus retorika populis “we” dan “others” oleh Ruth Wodak

Populis populis menggunakan kekuatan kolektif yang terkonsolidasi untuk dieksploitasi rasa takutnya dan kemudian mengeksploitasinya untuk bertahan³⁰. Misalnya pada isu migrasi, melalui kapasitas untuk mengaitkan ketakutan tertentu dengan program tata kelola yang berbeda, terutama melalui rutinitas yang dilembagakan, proposal keamanan menjadi mungkin³¹. Dalam hal ini, kelompok merupakan titik acuan nyata, dan acuan moral dalam keamanan, yang diperdagangkan dengan penolakan naluriah sebagai kepuasan logika *vis-à-vis* mereka³². Dengan demikian ketakutan menjadi insentif yang kuat bagi populis untuk membentuk opini publik yang mengarah pada preferensi politik³³.

²⁹ Desiree Bryan. "The Popularity of the 'New Terrorism' Discourse". 2012. <https://www.e-ir.info/2012/06/22/the-popularity-of-the-new-terrorism-discourse/>

³⁰ Muqtedar Khan and Isa Haskologlu. "Fear as Driver of International Relations". 2020. <https://www.e-ir.info/2020/09/02/fear-as-driver-of-international-relations/>

³¹ Eric Van Rythoven. "Emotion and Dystopian Idealism in Security Studies". 2014. <https://www.e-ir.info/2014/12/21/emotion-and-dystopian-idealism-in-security-studies/>

³² Robert Schuett. "Fear and Freud in Politics: Critical Notes on Mearsheimer's Structural Realism". 2020. <https://www.e-ir.info/2020/09/04/fear-and-freud-in-politics-critical-notes-on-mearsheimers-structural-realism/>

³³ Holger Mölder. "THE CULTURE OF FEAR IN INTERNATIONAL POLITICS – A WESTERN-DOMINATED INTERNATIONAL SYSTEM AND ITS EXTREMIST

Menurut Wodak, ada empat asumsi bagaimana populis memanfaatkan ketakutan kolektif ini.

- Populis sayap kanan menginstrumentalkan beberapa jenis minoritas etnis, agama, bahasa, atau politik sebagai “*scapegoat*” bagi sebagian besar jika tidak semua masalah yang terjadi saat ini dalam Masyarakat. Kemudian menafsirkan kelompok-kelompok tersebut sebagai berbahaya dan ancaman terhadap “*we*”, bagi bangsa “*we*”

- Partai-partai populis sayap kanan, dalam langkah kedua, menginstrumentalisasi ketakutan semacam itu untuk menciptakan **harapan** dengan berjanji untuk memberikan solusi untuk melawan ketakutan tersebut. Mereka membangun diri mereka sendiri dan tampil sebagai “*savior*”.

- Partai-partai populis sayap kanan dan para pemimpin mereka menggunakan **politik emosi**: Mereka mendukung apa yang dapat diakui sebagai '*arrogance of ignorance*,' berbanding pada akal sehat, intuisi, kebencian, dan anti-intelektualisme yang menandai pergeseran ke politik emosi alih-alih memanfaatkan bukti dan keahlian berbasis fakta. Beberapa sarjana berbicara tentang politik 'pasca-kebenaran', yang lain tentang 'anti-politik' dalam konteks ini.

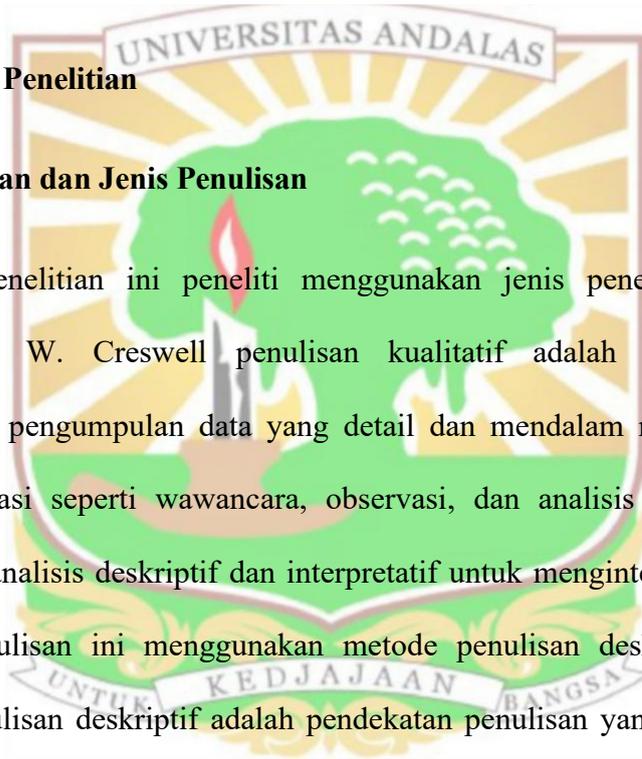
- Agenda populis sayap kanan dan retorika terkait mencapai atau telah mencapai arus utama politik. Oleh karena itu, kita dihadapkan pada **normalisasi** kebijakan sayap kanan yang meluas dan berkembang, dari

CHALLENGES”. 2011. ENDC Proceedings, Volume 14, 2011, pp. 241–263.
<http://www.ksk.edu.ee/toimetised>

topik, kata-kata yang sebelumnya tabu dan perilaku tidak sopan atau tidak tahu malu. Norma dan aturan tradisional budaya politik, negosiasi dan musyawarah, dilanggar oleh provokasi terus-menerus, disebarluaskan melalui media, didukung oleh konservatif arus utama, dan dengan demikian dinormalisasi. Wodak mengusulkan untuk melabeli karakteristik baru budaya politik ini sebagai '*shameless normalization*'.

Retorika, masyarakat, media, komunikasi, dan kebijakan serta implementasinya, bersifat kompleks yang mana saling bergantung dan berkaitan dengan banyak bidang masyarakat. Tidak semua ini terpengaruh secara bersamaan, normalisasi dapat mempengaruhi beberapa bidang sosial lebih cepat dan lebih komprehensif daripada yang lain. Yang terpenting, perubahan seringkali tetap tidak dapat diprediksi. Oleh karena itu Wodak percaya bahwa '*reflective deceleration*' adalah respons yang sangat berguna dalam situasi yang bergejolak seperti itu. Refleksi kritis menantang strategi, keputusan, proposal dan kebijakan, sehingga melarang esensialisasi keyakinan, ideologi, dan proses sosial-politik. Argumen 'TINA' (*There Is No Alternative*) tidak boleh diterima begitu saja³⁴. Dalam buku ini Wodak berharap dapat menginspirasi '*Reflective Deceleration*' tersebut dan, selanjutnya, memungkinkan ditemukannya cara-cara baru untuk memahami setidaknya beberapa aspek dari tantangan global dan lokal yang sangat besar yang sedang kita hadapi.

³⁴ Ruth Wodak. (2020) *The Politics of Fear : The Shameless Normalization of Far-Right Discourse*. Sage Publication Ltd



1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Pendekatan dan Jenis Penulisan

Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. Menurut John W. Creswell penulisan kualitatif adalah penulisan yang berorientasikan pengumpulan data yang detail dan mendalam melalui berbagai sumber informasi seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen, serta menggunakan analisis deskriptif dan interpretatif untuk menginterpretasikan data tersebut³⁵. Penulisan ini menggunakan metode penulisan deskriptif. Menurut Sugiyono, penulisan deskriptif adalah pendekatan penulisan yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data yang detail dan mendalam melalui berbagai sumber informasi³⁶.

1.8.2 Batasan Penelitian

³⁵ Alison Twycross, "Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods approaches Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches Creswell John W Sage 320 £29 0761924426 0761924426," *Nurse Researcher* 12, no. 1 (September 1, 2004): 82–83, <https://doi.org/10.7748/nr.12.1.82.s2>.

³⁶ Sugiyono, *Metode Penulisan Kuantitatif, Kualitatif, Dan RD* (Bandung, Indonesia: Alfabeta, 2013).

Dalam penelitian ini saya membatasi bahasan topik pada isu keamanan yang diangkat oleh koalisi Partai Liberal Australia. Saya memilih membatasi bahasan pada partai alih-alih perdana menteri karena terdapat kecenderungan tindakan yang dilakukan oleh setiap perdana menteri yang diusung koalisi Partai liberal-Nasional pada isu imigrasi. Sedangkan untuk rentang tahun yang dipilih, saya memilih rentang waktu dari tahun mulai dari tahun 2013 dan diakhiri pada tahun 2015 karena pada periode ini ditemukan lebih banyak data-data yang dibutuhkan untuk penelitian. Namun saya tetap memasukkan sedikit dari data-data di tahun sebelumnya dan setelahnya untuk menguatkan analisis.

1.8.3 Unit dan Level Analisis

Unit analisis adalah satuan yang diteliti berupa individu, kelompok, benda, atau suatu latar peristiwa sosial. Unit analisis ini digunakan sebagai subjek penulisan dengan tujuan mendapatkan data yang relevan dan akurat³⁷. Unit analisis dalam penelitian ini adalah isu keamanan terhadap Imigran di Australia. Sedangkan Unit eksplanasi atau yang disebut dengan variabel independen merupakan sebuah unit yang akan menjadi dampak atau pun dapat memengaruhi objek yang akan diteliti³⁸. Dalam penelitian ini unit eksplanasinya adalah Koalisi Partai Liberal-Nasional.

Level analisis adalah target analisis dimana peneliti dapat memperoleh gambaran(*description*), penjelasan(*explanation*) dan perkiraan(*prefiction*) yang akurat tentang perilaku organisasi/aktor internasional.³⁹ Level analisis berguna

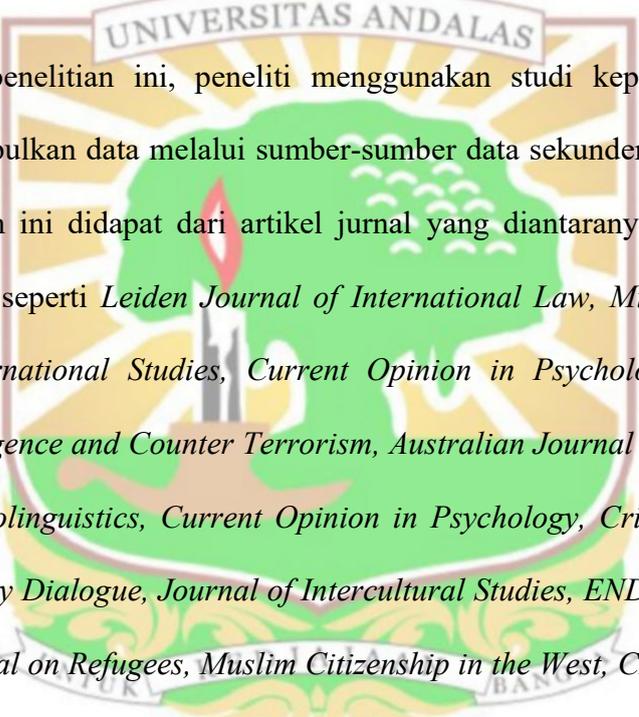
³⁷Morrison. Metode Penulisan. Jakarta: Raja Grafindo, 2017

³⁸Mohtar Mas'oe, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin Dan Metodologi* (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 1994).

³⁹David Singer, "The Level-of-Analysis Problem in International Relations," *World Politics*

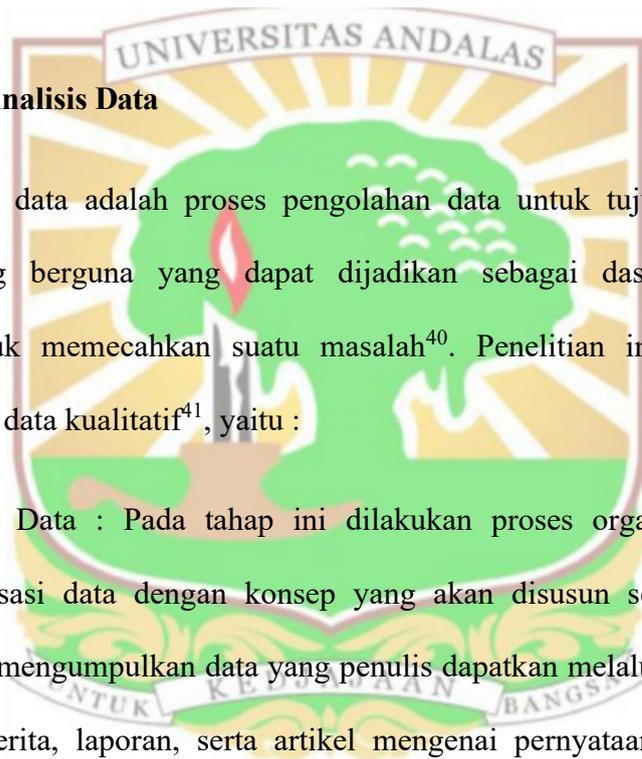
untuk membantu penulis menjelaskan penulisan yang akan dijelaskan. Level analisis dalam penelitian ini adalah level *state* karena menjelaskan bagaimana partai politik melalui retorika tokoh politik serta media yang mendukung, mampu mempengaruhi pandangan keamanan suatu negara yang berakibat pada arah kebijakan.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data



Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan studi kepustakaan dalam teknik mengumpulkan data melalui sumber-sumber data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini didapat dari artikel jurnal yang diantaranya dimuat dalam beberapa jurnal seperti *Leiden Journal of International Law*, *Migration Letters*, *Review of International Studies*, *Current Opinion in Psychology*, *Journal of Policing, Intelligence and Counter Terrorism*, *Australian Journal of Social Issues*, *Journal of Sociolinguistics*, *Current Opinion in Psychology*, *Critical Studies on Security*, *Security Dialogue*, *Journal of Intercultural Studies*, *ENDC Proceeding*, *Canada's Journal on Refugees*, *Muslim Citizenship in the West*, *CRITICAL ISSUE IN GLOBAL POLITICS*, *Journal of Common Market Studies*, *Journal of Australian Studies*, *Jurnal Studi Hubungan Internasional*, *PADJAJARAN Journal of International Relations*, *Australian Journal of Political Science*, *The British Journal of Criminology*, *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, *Australian Journal of Islamic Studies*, *Australian Journal of International Affairs*, *Journal of International Affairs*, *The British Journal of Criminology*. Penulis juga mengambil

data dari situs resmi pemerintah, partai, organisasi dan institusi seperti *Australia National Maritime Museum, Australian Government Attorney- General's Department, National Musseum of Australia, Digital Classroom-National Museum of Australia, Museum Of Australian Democracy At Old Parliament House, Museums Victoria, Office of Homeland Security Statistics: OHSS, Parliamentary Education Office, Parliament of Australia, Australian Visas and Immigration | ILM Australia, Museum Of Australian Democracy At Old Parliament House, Liberal Party of Australia, National Party of Australia, Liberal National Party of Queensland, One Nation, Migration Policy Institute, European Union Agency for Asylum, Australia Human Right Commission, Asylum Seeker Resource Centre, United Nation High Commission for Refugees, Refugee Council of Australia, Our World In Data, Operation Sovereign Border, Amnesty International, UNSW Sydney, University of Melbourne, P2K STEKOM.* Terakhir, penulis juga menggunakan sumber dari artikel berita yang diantaranya dimuat oleh *The Guardian, Australian Broadcasting Corporation, Sky News, The Herald Sun, Al-Jazeera, Canberra Times, Special Broadcasting Service, The Saturday Paper.* Sumber-sumber data ini didapat melalui pencarian dengan menggunakan kata kunci *Immigrant, Security Issue, Fear, Liberal-National Coalition, Australia.*



1.8.5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses pengolahan data untuk tujuan menemukan informasi yang berguna yang dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk memecahkan suatu masalah⁴⁰. Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif⁴¹, yaitu :

1. Reduksi Data : Pada tahap ini dilakukan proses organisasi data dan kategorisasi data dengan konsep yang akan disusun secara sistematis. Penulis mengumpulkan data yang penulis dapatkan melalui website resmi, kanal berita, laporan, serta artikel mengenai pernyataan serta tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Koalisi Liberal-Nasional terkait pencari suaka yang kemudian penulis kategorisasikan dan susun secara sistematis.

Istilah “pengungsi”, “pencari suaka” dan “migran” digunakan untuk menggambarkan orang-orang yang sedang berpindah meninggalkan negara

⁴⁰ Firdilla Kurnia, “Prosedur Analisa Data,” *DailySocial*, 2023.

⁴¹ Johnny Saldana Oleh Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis* (Sage Publications, 1994).

asal mereka dan melintasi perbatasan⁴². Kategori pencari suaka, pengungsi, dan imigran sering digunakan secara bergantian dalam merujuk orang yang berpindah meninggalkan negara asal dan melintasi perbatasan⁴³ sehingga menyiratkan istilah-istilah tersebut setara. Dalam menganalisa isu ‘penolakan di perbatasan’ yang merujuk pada isu keamanan, masing-masing sarjana juga menggunakan istilah-istilah tersebut namun merujuk pada kategori pengungsi dan pencari suaka. Oleh karena itu saya menggunakan terminologi imigran untuk mencakup definisi orang yang berpindah meninggalkan negara asalnya dan melintasi perbatasan namun tetap ditujukan pada kategori pencari suaka dan pengungsi agar lebih mudah dalam pengumpulan data.

2. Penyajian Data : Pada fase ini, penulis melakukan proses menghubungkan data dengan kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian. Penulis mengkorelasikan data yang penulis dapat dengan kerangka konseptual yang penulis gunakan, yaitu *The Politics of Fear* untuk menjelaskan isu keamanan terhadap imigran oleh pemerintah Koalisi Partai Liberal-Nasional Australia.
3. Penarikan Kesimpulan : Fase ini akan meliputi proses evaluasi dan pelaporan hasil. Setelah menyelesaikan tahap reduksi dan penyajian data, penulis akan menarik kesimpulan. Pada fase ini, peneliti akan menjelaskan bagaimana penggunaan ketakutan dalam isu keamanan terhadap imigran

⁴² <https://www.amnesty.org/en/what-we-do/refugees-asylum-seekers-and-migrants/#:~:text=The%20terms%20%E2%80%9Crefugee%E2%80%9D%2C%20%E2%80%9C,t here%20is%20a%20legal%20difference.>

⁴³ https://www.breadwinners.org.uk/blog/2020/9/8/refugees-vs-seeking-asylum?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjw1um-BhDtARIsABjU5x4K9hWSq-4ZsxumJXAfUlRzTqllLhrq_6tr96datSpDSDZfgsGMc0aAjycEALw_wcB

oleh Koalisi Partai Liberal-Nasional Australia yang sebelumnya telah dianalisis dengan konsep yang dipilih .

